

Partisipasi Masyarakat Dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Nagari Batahan

Ainimar¹, Lince Magriasti²

^{1,2} Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received : 02 Januari 2023 Publish : 6 Januari 2023</p>	<p>Community participation in the uninhabitable housing program is required at every stage which includes the stages of planning, implementation, utilization of results, and evaluation. However, when the program was implemented, community participation did not reach the four stages. Therefore, the purpose of this study was to determine to what extent the entire stages of the rehabilitation program for uninhabitable houses involved community participation. This research method is carried out using descriptive research methods, with a quasi-qualitative approach. Data were analyzed manually using the MDAP (Manual Data Analysis Procedure) technique. Based on the results of the study, it was found that community participation at the program planning stage was still low; at the stage of program implementation the level of community participation is already high; Likewise, at the utilization stage, the level of community participation is already high: while at the evaluation stage the level of community participation is very low (none). Based on this, the level of community participation at the planning and evaluation stages still needs to be increased.</p>
<p>Keywords: <i>Liability,</i> <i>Notary,</i> <i>Money Laundering Crime.</i></p>	
<p>Info Artikel Article history: Received : 02 Januari 2023 Publish : 6 Januari 2023</p>	<p>ABSTRAK Partisipasi masyarakat dalam program rumah tidak layak huni diperlukan dalam setiap tahapan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Akan tetapi ketika program dijalankan partisipasi masyarakat tidak mencapai ke-empat tahapan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan masyarakat pada keseluruhan tahapan penyelenggaraan program. metode dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuasi kualitatif. Data dianalisis secara manual dengan memakai teknik analisis MDAP (<i>Manual Data Analysis Procedure</i>). Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan program masih rendah; pada tingkat pelaksanaan program tingkat partisipasi masyarakat sudah tinggi; begitu pula pada tahap pemanfaatan hasil tingkat partisipasi masyarakat sudah tinggi; sementara pada tahapan evaluasi tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah (tidak ada). Berdasarkan hal tersebut maka tingkat partisipasi masyarakat pada tahapan perencanaan dan evaluasi masih perlu ditingkatkan.</p>
	<p><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p>
<p>Corresponding Author: Ainimar Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang</p>	

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih belum teratasi hingga saat ini dikarenakan oleh beberapa faktor seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan lahan usaha, sulitnya mengakses informasi, serta ketervatasan investasi (Putra, 2019). Kemiskinan dapat mengakibatkan manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar (pokok) keluarganya dan tidak terkecuali kebutuhan hidupnya sendiri. Kebutuhan dasar tersebut adalah sandang, pangan dan papan. Tidak terpenuhinya kebutuhan pokok oleh masyarakat menunjukkan bahwa kemiskinan masyarakat berada pada tingkat darurat. Salah satu hal yang menyebabkan fungsi keluarga tidak dapat dilakukan dengan baik adalah ketidak mampuan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya khususnya kebutuhan akan tempat tinggal/papan. Sebagai kebutuhan dasar yang sangat penting rumah merupakan salah satu tolak ukur standar hidup bagi kesejahteraan serta kesehatan hidup masyarakat (Ismowati & Subhan, 2018).

Masalah perumahan merupakan masalah umum yang memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membuat program RTLH yang dicanangkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini sudah diatur pada pasal 54 (Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2011, 2011). Sejalan dengan itu pemerintah Sumatera Barat juga membuat kebijakan (dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2013, 2013) mengenai petunjuk pelaksanaan program. Sementara pedoman pelaksanaan program diatur lebih khusus dalam regulasi pemerintah daerah pasaman barat (Peraturan Bupati Pasaman Barat No 24 Tahun 2019, 2019)

Program RTLH ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini diberikan dalam bentuk bantuan tunai kepada masyarakat. Dana yang diberikan berjumlah sebanyak Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembelian bahan baku dan juga untuk pembayaran upah. Sebelumnya dana itu terlebih dahulu di potong pajak sebanyak 10 %. Kemudian upah disisihkan sebanyak Rp 2.500.000, kemudian sisanya digunakan untuk pengadaan bahan baku.

Pasaman Barat mempunyai angka kemiskinan yang tinggi sesuai dengan data BPS yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Pasaman Barat mencapai 7,14% (Badan Pusat Statistik BPS, 2020). Hal ini membuat program RTLH menjadi program yang sangat membantu dalam proses pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data perkim pada tahun 2021 terdapat 8.269 rumah yang tidak layak huni di kabupaten Pasaman Barat. Hal ini menunjukkan bahwa program RTLH mempunyai sasaran yang banyak. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa masih banyak daerah di Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki masyarakat yang tergolong tidak mampu dalam membangun hunian yang nyaman. Sehingga perlu bagi pemerintah untuk membantu dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dalam hal tempat tinggal.

Kabupaten Pasaman Barat sangat berupaya dalam membantu masyarakat dalam upaya memperoleh tempat tinggal yang nyaman, sesuai dengan data Perkim pada tahun 2021 berikut ini.

Tabel 1. Jumlah penerima Bantuan RTLH Tahun 2020 s/d 2021.

No	Nagari	Jumlah Penerima Bantuan (Unit)		Jumlah
		2020	2021	
1	Muara Kiawai	20	8	28
2	Rabi Jonggor	16	7	23
3	Kinali	15	17	32
4	Katiagan	10	15	25
5	Parik	8	15	23
6	Ujung Gading	9	10	19
7	Kapa	15	7	22
8	Koto Baru	8	10	18
9	Lingkuang aua	15	8	23
10	Aua Kuniang	-	13	13
11	Aia Gadang	10	9	19
12	Batahan	23	17	40
13	Desa Baru	15	15	30
14	Sasak	5	10	15
15	Sungai Aur	15	5	20
16	Air Bangis	11	11	22
17	Kajai	15	9	24
18	Sinuruik	5	10	15
19	Talu	9	15	24
Jumlah RTLH Kabupaten Pasaman Barat		224 Unit	211 Unit	435

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukin Pasaman Barat, 2021.

Dari tabel 1. dapat diketahui bahwa terdapat 435 Unit rumah yang telah diberikan kepada masyarakat penerima bantuan pada tahun 2020 dan 2021. Nagari Batahan merupakan Nagari yang memiliki perolehan bantuan terbanyak dari 19 Nagari yang terdapat di Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam pelaksanaannya program ini dijalankan oleh *Stakeholder*. *Stakeholder* adalah seluruh pihak yang terkait dan juga paham terhadap permasalahan yang dikerjakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Mahfud et al., 2015). *Stakeholder* sendiri meliputi pihak pemerintah, pihak swasta, dan pihak masyarakat. Kerjasama dari seluruh pihak sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan program.

Tujuan dari pelaksanaan program adalah untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat, dengan kata lain masyarakat adalah modal utama terlaksananya program. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat program tentunya akan terjadi ketimpangan. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat dianggap penting dalam pelaksanaan program.

Masyarakat perlu dilibatkan dalam keseluruhan tahapan program. Akan tetapi di Nagari Batahan tingkat keterlibatan masyarakat belum tinggi. Hal ini sesuai dengan ujaran Taufik saat diwawancarai. Beliau menyebutkan bahwa pada tahapan perencanaan keterlibatan masyarakat masih minim karena masyarakat lebih dahulu mendahulukan pekerjaan mereka daripada mengikuti proses perencanaan. Masyarakat hanya turun saat pelaksanaan pembangunan. Begitu juga dengan tahap pengendalian dan evaluasi, masyarakat seakan-akan menganggap hal tersebut tidak penting dan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada pihak jorong maupun fasilitator.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mendeskripsikan seberapa jauh Keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi di program RTLH di Nagari Batahan dengan melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Program RTLH di Nagari Batahan**

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis penelitian

Desain Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif semu (*Quasi Qualitatif Design*) dengan menggunakan metode *Simple Research Design (SRD)*. Dalam metode ini dilakukan lima langkah penelitian yang meliputi: (a) memilih konteks sosial dan membuat pertanyaan; (b) *Literature Review*; (c) Memilih metode penelitian dan mengoleksi data; (d) melakukan analisis data; (e) melaporkan hasil penelitian (Bungin, 2020)

2.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dimulai dari bulan maret hingga bulan April 2022 di Nagari Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

2.3. Target/Subjek Penelitian

Penentuan informan penelitian dilakukan secara *purposive sampling* meliputi: Wali Nagari, Petugas Teknis Nagari, Kepala Jorong, dan Masyarakat.

2.4. Prosedur

Prosedur penelitian ini dilakukan sesuai dengan prosedur analisis MDAP. MDAP merupakan prosedur analisis data yang dilakukan secara manual (Bungin, 2020) Prosedur analisis data tersebut dilakukan menggunakan enam tahapan yaitu:

- 1) Catatan Harian, yaitu proses awal dalam pengumpulan informasi pada setiap kegiatan khusus kode yang ada sehingga memperoleh kategori yang besar dengan tema yang serupa.
- 2) Memos merupakan catatan yang dibuat untuk memperjelas topik yang dilakukan peneliti saat pengamatan dilapangan.
- 2) Transkrip merupakan salinan dari catatan harian yang diperoleh dilapangan yang terdiri dari isi jalannya wawancara, diskusi, data observasi ataupun peristiwa yang terjadi saat wawancara dilakukan.
- 3) Koding, yaitu pemberian kode terhadap segmen-segmen data untuk memulai suatu analisis tentang fenomena tertentu yang dimulai dari pengodean terbuka, pengodean berporos, pengodean terpilih (Murdowo, 2018)

- 4) Kategorisasi, dalam tahap ini peneliti akan memasukkan kode yang sama kedalam satu kategori yang sama.
- 5) Tema merupakan pengelompokan kategori berdasarkan sifat penelitian, serta mekanisme yang dibuat untuk menghubungkan ide atau asumsi terkait data yang diperoleh dilapangan.

2.5.Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan penelitian melalui proses wawancara. Data primer memberikan gambaran secara umum mengenai permasalahan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program RTLH. Sedangkan tara sekunder dikumpulkan dari data dokumen profil Nagari Batahan, peraturan daaerah mengenai program RTLH, serta literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data ini dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi.

2.6.Teknik Analisis Data

Teknil analisis dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian dengan menggunakan teknik *Manual Data Analysis Prosedur (MDAP)*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang telah ditemukan di lapangan yaitu catatan harian dan hasil wawancara dicantumkan dalam bentuk data transkrip. Setelah data tersebut terkumpul, maka data dipadatkan dalam analisis data *open coding*. Berikut ini data dicantumkan dalam tabel 2.

Tabel 2. Analisis *Open Coding*

Kode	Pemadatan konsep
#1	Partisipasi masyarakat ada hanya saya lebih kepada sosialisasi
#2	Perencanaan lebih didominasi oleh oleh pemerintah dan masyarakat hanya penerima saja
#3	Keterlibatan masyarakat sangat terlihat dan sudah baik
#4	Masyarakat dapat menjadi suplyer bahan bangunan juga menjadi tukang bangunan.
#5	Program memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat
#6	Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya program
#7	Program dapat meringankan beban masyarakat khususnya dalam bidang rumah
#8	Evaluasi sudah dilakukan hanya saja masyarakat tidak dilibatkan.
#9	Evaluasi dilakukan berdasarkan acuan dasar penetapan program
#10	Masyarakat tidak diberikan ruang untuk berpartisipasi
#11	Usia dan jenis kelamin memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat
#12	Kepala Jorong memberikan kontribusi yang besar dalam program
#13	Pengawasan terhadap program dilakukan dalam tiga tahapan
#14	Masyarakat sering terkendala dalam penyediaan bahan diluar barang toko
#15	Kendala lain yang dihadapi adalah faktor cuaca yang tidak menentu
#16	Sulitnya mendapatkan barang yang berkualitas karna keterbatasan dana

Sumber: Peneliti olah berdasarkan hasil wawancara.

Dari tabel 2 tersebut diketahui bahwa terdapat enam belas sub kategori. Selanjutnya keenam belas data tersebut diolah dalam bentuk *axial coding*. Berikut ini dicantumkan hasil *axial coding* dalam tabel 3.

Tabel 3. Analisis Axial Coding

Konsep	Subkategori
Konsep #1 Konsep #2	Subkategori #1 perencanaan dilakukan oleh pihak pemerintah sedangkan masyarakat hanya sebagai pihak penerima
Konsep #3 Konsep #4 Konsep #5	Subkategori #2 dalam pelaksanaan masyarakat terlibat langsung sebagai penyedia bahan dan tukang bangunan namun kadang kesulitan dalam memperoleh bahan yang berkualitas
Konsep #6 Konsep #7 Konsep #8	Subkategori #3 program memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat
Konsep #9 Konsep #10	Subkategori #4 evaluasi dilakukan berdasarkan acuan dasar program dan tidak melibatkan masyarakat

Sumber: Peneliti olah berdasarkan data *Open Coding*

Dari tabel 3 di atas diketahui bahwa terdapat empat sub kategori. Dari data tersebut dilanjutkan dalam analisis *selective coding*. Berikut ini hasil dari *selective coding* dicantumkan dalam tabel 4.

Tabel 4. Analisis Selective Coding

Subkategori #1	Kategori #1 Perencanaan Kurangnya keterlibatan masyarakat
Subkategori #2	Kategori #2 Pelaksanaan Masyarakat terlibat langsung sebagai aktor pelaksana program
Subkategori #3	Kategori #3 Pemanfaatan Hasil Masyarakat merasakan manfaat dari program
Subkategori #4	Kategori #4 Evaluasi Partisipasi masyarakat tidak ada

Sumber: Peneliti olah berdasarkan data *Axial coding*

Dari hasil analisis *selective coding* didapatkan bahwa terdapat empat kategori. Berikut ini penjelasan dari keempat kategori tersebut.

Kategori #1 Perencanaan

Bentuk intervensi dari program ini adalah melalui tahapan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dengan dibantu secara teknis oleh fasilitator yang diambil dari pemerintah nagari sebagai tenaga pendamping bukan pelaksana. Tahapan perencanaan ini diawali dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan terkait mekanisme pelaksanaan program serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Hasil dari pengodean menunjukkan bahwa partisipasi pada tahap perencanaan dalam program rehabilitasi RTLH masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan temuan data yang menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan program masyarakat hanya dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi mengenai mekanisme pelaksanaan serta proses pelengkapan administrasi.

Pihak Nagari Batahan selaku informan juga menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan tidak dituntut. Proses perencanaan program didominasi oleh pihak pemerintah selaku pihak pemberi dana dan juga pembuat program. Pemerintah jugalah yang membuat perencanaan program mulai dari penganggaran dana, pembuatan desain bangunan dan proses pembangunan. Padahal seharusnya masyarakat mempunyai peran penting dalam tahapan perencanaan tersebut. Masyarakat perlu dilibatkan dalam hal perencanaan dan pembuatan desain. Hal ini sesuai dengan peran masyarakat yang disebutkan dalam Pasal 131 Undang-Undang No 1

Tahun 2011 ayat (2). Disamping itu dibutuhkan untuk menyesuaikan desain rumah dengan kondisi tanah sebagai lokasi pembangunan masyarakat. sehingga hasil program dapat tercapai secara maksimal.

Di Nagari Batahan proses perencanaan sama sekali tidak melibatkan pihak masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Suratman dalam wawancara dengan penulis selaku partisipan dalam program rumah tidak layak huni. Beliau menyebutkan bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan, masyarakat hanya perlu mendatangi pihak jorong untuk menyerahkan berkas yang nantinya akan diserahkan ke pihak nagari.

Maka dapat disimpulkan sesuai dengan hasil pengodean yang dilakukan pada Kategori #1 tema perencanaan terlihat bahwa pada tahap perencanaan partisipasi masyarakat rendah, hal dapat mempengaruhi pelaksanaan program rehabilitasi RTLH di Nagari Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Kategori #2 Pelaksanaan

Pada hasil pengodean kategori #2 yakni pelaksanaan terlihat bahwa partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan sangat baik. Masyarakat sebagai aktor yang menjalankan program terlibat langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Disamping itu masyarakat sebagai penerima bantuan menjalankan tanggungjawabnya sebagai unsur utama pelaksanaan program tersebut disamping pemerintah. Hal ini terlihat pada pemenuhan barang mentah berupa kayu batu serta pasir masyarakat dapat mencari suplayer sendiri begitu juga dengan tukang bangun. Selain itu masyarakat yang memiliki potensi dapat menjadi tukang ataupun kenek (asistent tukang) dalam pelaksanaan.

Dapat disimpulkan berdasarkan pengodean Kategori #2 tema Pelaksanaan ditemukan bahwa partisipasi masyarakat sangat baik dalam pelaksanaan program. masyarakat menjalankan tanggungjawabnya sebagai penerima bantuan dengan menjadi tukang ataupun kenek. Keterlibatan masyarakat yang tinggi tentu memberikan pengaruh yang besar bagi pencapaian tujuan program rehabilitasi RTLH di Nagari Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Kategori #3 Pemanfaatan Hasil

Pada kategori ketiga yakni pemanfaatan hasil ditemukan bahwa masyarakat merasakan manfaat yang besar dari program yang diberikan. Masyarakat sangat terbantu dimana masyarakat yang awalnya belum mempunyai rumah sendiri atau tidak mempunyai rumah yang layak dapat menikmati tempat tinggal yang layak huni. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan awal program yang ingin menjadi stimulus bagi masyarakat tercapai. Hal ini dilihat dari masyarakat yang merasa sangat terbantu pada sisi perekonomian, anggaran yang awalnya untuk memperbaiki rumah dapat dialihkan untuk biaya sekolah anak ataupun kebutuhan lainnya.

Dapat disimpulkan dengan hasil pengodean kategori #3 tema Pemanfaatan Hasil bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap ini sangat baik yang menunjukkan tercapainya tujuan dari program yang dijalankan.

Kategori #4 Evaluasi

Kategori keempat yakni pada tahap Evaluasi partisipasi masyarakat tidak terlihat. Hal ini terjadi karena dalam tahap ini evaluasi program hanya dilakukan oleh pihak Nagari bersama dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat. Serta pengevaluasian yang dilakukan hanya terkait pada kesesuaian antara acuan yang diberikan dengan yang dilakukan oleh masyarakat. Disamping itu pengevaluasian yang dilakukan adalah sejauh mana target yang sudah dicapai dalam pembangunan yang dilakukan dalam tiga tahap evaluasi yakni tahap awal, tahap 50% bangunan serta pada tahap 100% pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut hasil koding menunjukkan bahwa kategori #4 tema Evaluasi didapati tidak adanya partisipasi masyarakat karena evaluasi yang dilakukan terkait kesesuaian antara acuan dasar yang diberikan oleh pihak nagari dengan apa yang dijalankan oleh masyarakat.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dalam pembahasan penelitian terkait tingkat partisipasi masyarakat dalam program RTLH dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Partisipasi dalam perencanaan
Keterlibatan masyarakat pada saat perencanaan program cukup baik masyarakat cukup aktif dalam proses pelengkapan syarat administrasi serta ikutserta pada saat sosialisasi program.
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan
Keikutsertaan masyarakat pada pelaksanaan program Rehabilitasi RTLH sangat baik, hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam bentuk tenaga, masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan sebagai tenaga pekerja maupun penyedia bahan.
- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
Masyarakat sudah terlibat dalam pemanfaatan hasil program. Hal terlihat dari masyarakat yang sudah memanfaatkan hasil dari program yang dilaksanakan dimana masyarakat memanfaatkan atau menggunakan rumah yang telah dibuat serta dirawat dengan baik.

SARAN

Didasarkan pada simpulan di atas, maka disarankan agar pemerintah Nagari perlu meningkatkan partisipasi masyarakat di Nagari Batahan Kabupaten Pasaman Barat dengan cara memberikan sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat bagi pembangunan. Disamping itu pemerintah juga perlu menyediakan ruang agar masyarakat dapat terlibat dalam setiap proses pembangunan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2011, (2011).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39128>
- Badan Pusat Statistik BPS. (2020). *Pasaman Barat Dalam Angka*.
<https://pasamanbaratkab.bps.go.id/>
- Bungin, B. (2020). *Post Qualitative Social Research Methods Kuantitatif-Kualitatif-Mixed Methods*. Kencana.
- Ismowati, M., & Subhan, A. (2018). Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Padeklang. *Jurnal Transparansi*, 1(2), 194–205.
<https://core.ac.uk/download/pdf/228466043.pdf>
- Mahfud, M. A. Z., Haryono, B. S., & Anggraeni, N. L. V. (2015). Peran Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(12), 2070–2076.
<https://media.neliti.com/media/publications/83039-ID-peran-dan-koordinasi-stakeholder-dalam-p.pdf>
- Murdowo, D. (2018). Pendidikan Karakter Berbasis Asrama Untuk Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Organisasi (Penelitian Grounded Theory Pada Universitas Telkom). *Repository.Upi.Edu*, 81.
http://repository.upi.edu/30634/6/D_PU_1402830_Chapter3.pdf
- Peraturan Bupati Pasaman Barat No 24 Tahun 2019, (2019).
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2013, (2013).
- Putra, M. A. (2019). Pengaruh kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program Rehabilitasi-Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10, 37–43. <https://scholar.google.com/scholar?j>